

**SKRIPSI**



**INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH (BMD) BERUPA  
PERALATAN DAN MESIN BERBASIS *GOOD GOVERNANCE*  
DI BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS JAKARTA**

Disusun Oleh:

Nama : Nadia Margareta  
NPM : 2113011040  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**JAKARTA, TAHUN 2024**



**INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH (BMD) BERUPA  
PERALATAN DAN MESIN BERBASIS *GOOD GOVERNANCE*  
DI BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Terapan**

**Oleh:**

**NAMA : Nadia Margareta  
NPM : 2113011040  
JURUSAN : Administrasi Publik  
PROGRAM STUDI : Administrasi Pembangunan Negara**

**SKRIPSI  
PROGRAM SARJANA TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**JAKARTA, TAHUN 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nadia Margareta  
NPM : 2113011040  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Judul : Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa Peralatan dan Mesin Berbasis *Good Governance* di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan  
Pada, 18 November 2024

Pembimbing



Retnayu Prasetyanti, S.A.P., M.A.P.

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

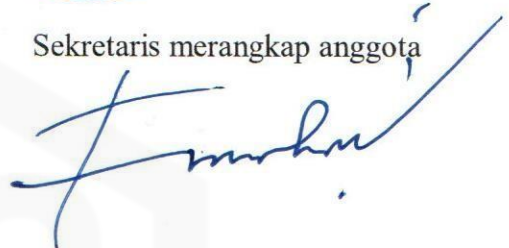
Diperiksa dan disahkan oleh tim penguji ujian tugas akhir sarjana terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta pada, 21 November 2024

Ketua merangkap anggota



Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd.

Sekretaris merangkap anggota



Dr. Firman Hadi Rivai, SSTP., MPA.

Anggota



Retnayu Prasetyanti, SAP., MAP.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## LEMBAR KEASLIAN NASKAH SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Nadia Margareta  
NPM : 2113011040  
JURUSAN : Administrasi Publik  
PROGRAM STUDI : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa Peralatan dan Mesin Berbasis *Good Governance* di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 18 September 2024



Nadia Margareta

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, bimbingan, dan bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga menyampaikan salam dan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi yang berjudul " Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa Peralatan dan Mesin Berbasis *Good Governance* di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta" ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana terapan Administrasi Publik dari program studi Administrasi Pembangunan Negara dengan konsentrasi Manajemen Aset di kampus Politeknik STIA LAN Jakarta.

Selama penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Sutiyono., Ibu Lagina, yang telah mendidik, membesarkan peneliti, selalu mendoakan yang terbaik dan telah membiayai pendidikan selama perkuliahan.
2. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
3. Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si. selaku ketua jurusan Administrasi Publik.
4. Ibu Nila Kurnia Wati, S.A.P M.A.P. selaku ketua prodi Administrasi Pembangunan Negara Sarjana Terapan, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam berbagai hal.
5. Retnayu Prasetyanti, SAP., MAP. Selaku Pembimbing Akademik dan dosen pembimbing peneliti dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, nasihat, saran, dan bahkan motivasi selama proses penyusunan skripsi sampai selesai.
6. Ibu Inggrit selaku AAK Prodi Administrasi Pembangunan Negara yang telah membantu peneliti dalam surat menyurat selama proses penulisan skripsi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar serta staf Politeknik STIALAN Jakarta atas bimbingan dan ilmu yang diberikan kepada peneliti.

8. Ibu Lusiana Herawati, selaku Plt Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
9. Bapak Irfan Syahkuala selaku Kepala Bidang Penatausahaan Aset.
10. Ibu Yusi Dwi Rahmalia selaku Subkelompok Penatausahaan Aset, Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian.
11. Untuk Mas Nur Reza Mahardhika, Firda Shopiyati dan Tarisa Mita Andani telah kebersamai dalam penulisan skripsi serta memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti sehingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan dunia perkuliahan dengan terwujudnya penulisan skripsi ini.
12. Khayla Ibtisamah selaku sahabat yang telah membantu peneliti melewati masa-masa sulit dengan canda tawa, diskusi, dan motivasi yang tiada henti. Serta peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang tak pernah padam.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Maka dari itu, peneliti merasa perlu adanya kritik dan saran dalam hal skripsi ini dengan tujuan agar kedepannya dapat menjadi literatur atau kajian pustaka yang bermanfaat dan memberikan sebuah kontribusi bagi semua pihak .

Jakarta, 17 November 2024



Nadia Margareta

## ABSTRAK

### **Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa Peralatan dan Mesin Berbasis *Good Governance* di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta**

Nadia Margareta, 2113011040  
nadiamargareta03@gmail.com

Permasalahan pada penelitian ini adalah implementasi pelaksanaan inventarisasi aset tetap baru dilaksanakan bulan Mei 2024. Untuk tujuannya yaitu menganalisis Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam melaksanakan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa peralatan dan mesin dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pencatatan dan pelaporannya sudah mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, masih terdapat tantangan atau hambatan dalam mengimplementasikannya seperti kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi yang terlibat, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab antar stakeholder, perbedaan prioritas, dan kurangnya keterlibatan dalam perencanaan sistem baru turut memperburuk situasi ini.

**Kata Kunci:** Pencatatan; Pelaporan; dan *Good Governance*

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## **ABSTRACT**

### ***Inventory of Regional Property (BMD) in the form of Good Governance Based Equipment and Machinery at the Regional Asset Management Agency of the Special Region of Jakarta Province***

Nadia Margareta, 2113011040  
nadiamargareta03@gmail.com

*The problem in this study is the implementation of the new fixed asset inventory implementation in May 2024. The purpose is to analyze the Regional Asset Management Agency of the Special Region of Jakarta Province in carrying out the inventory of Regional Property (BMD) in the form of equipment and machinery by applying the principles of good governance. The method used is qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of this study are that the recording and reporting have realized the principles of good governance and are in accordance with applicable regulations. However, there are still challenges or obstacles in implementing it such as lack of coordination and collaboration between agencies involved, unclear roles and responsibilities between stakeholders, differences in priorities, and lack of involvement in planning the new system exacerbate this situation.*

**Keywords:** *Recording; Reporting; and Good Governance*

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR ISI

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| <b>SKRIPSI</b> .....                        | i                            |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....     | iii                          |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....      | Error! Bookmark not defined. |
| <b>LEMBAR KEASLIAN NASKAH SKRIPSI</b> ..... | v                            |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                 | vi                           |
| <b>ABSTRAK</b> .....                        | vii                          |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                     | x                            |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                   | xii                          |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                  | xiii                         |
| <b>DAFTAR ISTILAH</b> .....                 | xiv                          |
| <b>BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN</b> .....  | 1                            |
| A. Latar Belakang .....                     | 1                            |
| B. Rumusan Masalah .....                    | 11                           |
| C. Tujuan Penelitian.....                   | 12                           |
| D. Manfaat Penelitian.....                  | 12                           |
| 1.Manfaat Teoritis.....                     | 12                           |
| 2.Manfaat Praktis.....                      | 12                           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....        | 15                           |
| A. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....        | 15                           |
| 1.Tinjauan Kebijakan.....                   | 15                           |
| 2. Tinjauan Teori.....                      | 19                           |
| B. Konsep Kunci.....                        | 39                           |
| C. Kerangka Berpikir .....                  | 41                           |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....  | 43                           |
| A. Metode Penelitian.....                   | 43                           |
| B. Teknik Pengumpulan Data.....             | 44                           |
| 1.Jenis Data.....                           | 45                           |
| 2. Sumber Data.....                         | 45                           |
| C. Instrumen Penelitian.....                | 48                           |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data..... | 50        |
| 1. Teknik Pengolahan Data .....                  | 51        |
| 2. Analisis Data .....                           | 52        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>             | <b>54</b> |
| A. Penyajian Data .....                          | 54        |
| 1. Gambaran Umum .....                           | 54        |
| 2. Identifikasi Aspek-Aspek Inventarisasi .....  | 56        |
| B. Pembahasan.....                               | 65        |
| 1. Pencatatan .....                              | 66        |
| a. Mulai Proses.....                             | 66        |
| b. Pengumpulan Data.....                         | 69        |
| c. Finalisasi Dokumen.....                       | 73        |
| 2. Pelaporan.....                                | 76        |
| a. Penyelesaian dan Tindak Lanjut.....           | 76        |
| C. Sintesis Pemecahan Masalah .....              | 80        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                       | <b>82</b> |
| A. Kesimpulan .....                              | 82        |
| B. Saran .....                                   | 84        |
| DAFTAR PUSTAKA .....                             | 86        |
| LAMPIRAN                                         |           |
| RIWAYAT HIDUP PENELITI                           |           |

**POLITEKNIK**  
**STIA LAN**  
**J A K A R T A**

## DAFTAR TABEL

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Tabel 3. 1 Daftar <i>Key Informant</i> ..... | 48 |
|----------------------------------------------|----|



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1 Rencana Kerja BPAD Tahun 2024.....                                                                  | 6  |
| Gambar 1.2 Peresmian Tahapan Pelaksanaan Inventarisasi BMD.....                                                 | 10 |
| Gambar 1.3 Kegiatan Sensus BMD Peralatan dan Mesin (KIB B) Pada Unit<br>Pengelola Taman Margasatwa Ragunan..... | 10 |
| Gambar 2.1 Siklus Manajemen Aset .....                                                                          | 21 |
| Gambar 2.2 Mekanisme Penatausahaan Aset.....                                                                    | 28 |
| Gambar 2.3 Alur Manajemen Aset.....                                                                             | 29 |
| Gambar 2.4 Kerangka Berpikir .....                                                                              | 42 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPAD Tahun 2024.....                                                             | 55 |



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR ISTILAH

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| BPK-RI | : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia |
| BMD    | : Barang Milik Daerah                         |
| BMN    | : Barang Milik Negara                         |
| BPAD   | : Badan Pengelolaan Aset Daerah               |
| BAHI   | : Berita Acara Hasil Inventaris               |
| KIB    | : Kartu Inventaris Barang                     |
| LHI    | : Laporan Hasil Inventaris                    |
| PAD    | : Pendapatan Asli Daerah                      |
| PB     | : Petugas Barang                              |
| P3B    | : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang       |
| PD     | : Perangkat Daerah                            |
| PMK    | : Peraturan Menteri Keuangan                  |
| SKPD   | : Satuan Kerja Perangkat Daerah               |
| SK     | : Surat Keputusan                             |
| SPTJM  | : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak      |
| UKPD   | : Unit Kerja Perangkat Daerah                 |

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

# **BAB I**

## **PERMASALAHAN PENELITIAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem pemerintahan Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Dari tahun 1998 hingga 2008, pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi sektor publik, khususnya pengelolaan barang pemerintah daerah, dalam waktu yang relatif singkat (Mustakim, 2023). Adapun definisi dari pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang pada “Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.” Lebih lanjut, sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah diberi hak, wewenang, dan kewajiban oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengawasi sendiri urusan pemerintahan. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai wujud nyata dari desentralisasi pemerintahan dimana pemerintah daerah diberikan kebebasan dan lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Dengan adanya kewenangan otonomi daerah, diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan sektor publik. Hal ini termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menanggapi kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat.

Pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah tidak hanya menyangkut kewenangan administratif, tetapi juga disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan

kewenangan tersebut. Dua metode utama yang dapat digunakan untuk memberikan dana kepada pemerintah daerah ialah pendayagunaan potensi keuangan mereka dan mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Terlebih lagi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah komponen penting yang menentukan seberapa efektif dan efisien pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung jalannya operasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Sebagai salah satu bagian dari pengelolaan keuangan daerah, BMN/D harus dikelola dengan komitmen tinggi dalam aspek penatausahaan, pengamanan, perkuatan, dan pelaporan aset yang transparan dan akuntabel. Dengan jumlah aset yang cukup besar, pemerintah daerah dituntut untuk memastikan pengelolaan BMN/D dilakukan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Menurut “PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.” Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan, aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Penelitian ini berfokus pada aset tetap yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berperan penting dalam mendukung kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. “Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan (PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).” BMD, di sisi lain, didefinisikan sebagai barang yang dibeli atau diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dari perolehan yang sah lainnya. Sebagai bagian dari Barang Milik Daerah, aset tetap berfungsi sebagai sarana fisik untuk menyediakan layanan publik dan merupakan bagian besar dari total aset non lancar. Lebih lanjut, aset yang dalam hal ini aset tetap wajib dikelola dengan baik supaya dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan dan mendorong kemandirian keuangan daerah serta tidak hanya berperan dalam mendukung operasional pemerintahan, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat (Annisa et al., 2022). Pengelolaan yang kurang optimal dapat menyebabkan aset menjadi tidak produktif, terabaikan, atau bahkan rusak sehingga berpotensi menyebabkan kerugian bagi pemerintah daerah.

Pengelolaan aset daerah yang baik mencakup berbagai aspek, mulai dari pencatatan, perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset yang sudah tidak layak pakai. Proses ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Meilasari & Martadinata (2020), pengelolaan aset daerah yang efektif merupakan salah satu kunci untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Salah satu siklus penting dalam pengelolaan BMN/D adalah penatausahaan yang dalam hal ini penatausahaan aset tetap.

Penatausahaan yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki data yang lengkap dan akurat mengenai aset yang dimiliki sehingga memudahkan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan aset. Proses penatausahaan yang baik akan menghasilkan data yang lengkap dan mudah ditelusuri, yang akan membuat tugas pengelola barang lebih mudah. Data saat ini juga digunakan untuk merencanakan pengadaan dan pemeliharaan barang di tahun-tahun mendatang. Satu diantara manfaat dari adanya penatausahaan BMN/D ialah bahwa penatausahaan yang teratur akan meningkatkan kualitas penyajian neraca daerah yang disiapkan untuk pemeriksaan BPK-RI pada akhir tahun anggaran. Terlebih lagi, adanya penatausahaan berkaitan dengan aset tetap juga merupakan bagian dari perlindungan aset tetap yakni perlindungan administratif. Penatausahaan aset tetap wajib memenuhi kebutuhan pemerintah dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penghapusan aset, serta berfungsi sebagai alat kontrol sistem. Penatausahaan aset tetap yang efektif dan efisien merupakan salah satu elemen kunci dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal. Aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, dan infrastruktur memiliki nilai strategis dan finansial yang signifikan bagi pemerintah daerah. Oleh karenanya, untuk memastikan bahwa aset tetap dapat memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat, sangat penting untuk memiliki pengelolaan aset tetap yang baik. Penatausahaan mencakup pembukuan, inventarisasi dan pelaporan pencatatan pengelolaan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya setiap aset tercatat dengan akurat, dimanfaatkan secara optimal, dan dipelihara dengan baik.

Inventarisasi menjadi fokus utama pada penelitian ini dikarenakan inventarisasi aset dijalankan untuk mengetahui asal usulnya dan informasinya, termasuk volume, luas, spesifikasi, jenis, merk, dan harga perolehannya. Dengan inventarisasi yang akurat, pemerintah dapat memastikan pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel, serta menjaga

keandalan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penghapusan aset. Hal ini juga membantu dalam menjaga efisiensi serta memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki pemerintah bisa dipantau dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.

| RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH TAHUN 2024                                       |                                                                                       |                              |        |           |     |                     |               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-----------|-----|---------------------|---------------|------|
| URUSAN / BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                        | INDIKATOR                                                                             | KINERJA INDIKATOR TAHUN 2022 |        |           |     | ANGGARAN TAHUN 2022 |               |      |
|                                                                                              |                                                                                       | TARGET                       | SATUAN | REALISASI | %   | TARGET              | REALISASI     | %    |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | Indeks Kepuasan Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | 4                            | Indeks | 4         | 100 |                     | -             |      |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | Nilai Kepuasan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja                          | 4                            | Nilai  | 4         | 100 | 47,049,398          | 44,770,000    | 95%  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah di Gedung Graha Mental Spiritual | 4                            | Nilai  | 4         | 100 | 2,668,962,596       | 2,626,129,071 | 98%  |
|                                                                                              | Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung/Kantor                               | 4                            | Nilai  | 4         | 100 |                     |               |      |
|                                                                                              | Nilai Kepuasan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya           | 4                            | Nilai  | 4         | 100 |                     |               |      |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Nilai Kepuasan Pelayanan Terhadap Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor   | 4                            | Nilai  | 4         | 100 | 998,816,901         | 966,067,013   | 97%  |
|                                                                                              | Nilai Kepuasan Pemeliharaan dan Pengadaan Perlengkapan AC/ME dan Genset               | 4                            | Nilai  | 4         | 100 |                     |               |      |
|                                                                                              | Nilai Kepuasan Pemeliharaan Rutin Lift                                                | 4                            | Nilai  | 4         | 100 |                     |               |      |
|                                                                                              | Nilai Kepuasan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 4                            | Nilai  | 4         | 100 |                     |               |      |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dilakukan pengisian                        | 34                           | Buah   | 34        | 100 | 7,212,964           | 7,203,056     | 100% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         | Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 4                            | Indeks | 4         | 100 |                     | -             |      |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Nilai Kepuasan pelayanan terhadap Penyediaan Jasa Telepon, air, listrik, (TALI)       | 4                            | Nilai  | 4         | 100 | 1,680,000,000       | 1,584,725,786 | 94%  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                        | Nilai Kepuasan Pelayanan Terhadap Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor   | 4                            | Nilai  | 4         | 100 | 2,743,059,182       | 2,692,832,916 | 98%  |

| RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH TAHUN 2024                                       |                                                                                             |                              |         |           |     |                     |               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|-----|---------------------|---------------|------|
| URUSAN / BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH DAN<br>PROGRAM / KEGIATAN                        | INDIKATOR                                                                                   | KINERJA INDIKATOR TAHUN 2022 |         |           |     | ANGGARAN TAHUN 2022 |               |      |
|                                                                                              |                                                                                             | TARGET                       | SATUAN  | REALISASI | %   | TARGET              | REALISASI     | %    |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap perlengkapan kantor                                | 4                            | Nilai   | 4         | 100 | 38,347,540          | 38,305,889    | 100% |
| Facilitasi Kunjungan Tamu                                                                    | Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap Penyediaan Makanan dan Minuman                     | 4                            | Nilai   | 4         | 100 | 22,484,800          | 22,484,800    | 100% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                      | Nilai Kepuasan Pelayanan Terhadap Kebutuhan Kantor Cetak dan Penggandaan                    | 4                            | Nilai   | 4         | 100 | 12,243,330          | 12,231,087    | 100% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | Indeks Kepuasan Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 4                            | Indeks  | 4         | 100 |                     | -             |      |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 4                            | Nilai   | 4         | 100 | 57,023,582          | 56,573,151    | 99%  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Nilai Kepuasan Layanan Kebersihan Kantor BP3W                                               | 4                            | Nilai   | 4         | 100 | 1,447,825,709       | 1,240,205,784 | 86%  |
|                                                                                              | Nilai Kepuasan Layanan Penyediaan Perlengkapan Alat Kebersihan Gedung Kantor Eks BP3W       | 4                            | Nilai   | 4         | 100 |                     |               |      |
|                                                                                              | Jumlah gedung yang dikelola BPAD Prov DKI Jakarta yang dilakukan pemeliharaan/rehab         | 1                            | Gedung  | 1         | 100 |                     |               |      |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kantor/Lapangan Pekerja Mekanikal Elektrikal Gedung Eks BP3W | 24                           | Laporan | 24        | 100 | 209,791,911         | 205,265,435   | 98%  |
|                                                                                              | Nilai Kepuasan Layanan Mekanikal Elektrikal                                                 | 4                            | Nilai   | 4         | 100 |                     |               |      |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah tabung APAR yang dilakukan pengisian ulang                                           | 11                           | Tabung  | 11        | 100 | 2,475,660           | 2,473,184     | 100% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         | Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 4                            | Indeks  | 4         | 100 |                     | -             |      |

| KODE               | PROGRAM / KEGIATAN                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                    | TARGET | SATUAN  | ANGGARAN      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|
|                    | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                                                                                                         | Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                 |        |         |               |
| 5.02.01.1.08.00 04 |                                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                         | 1      | Laporan | 70,518,277    |
| 5.02.01.1.09       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                         | Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | 4      | Indeks  |               |
| 5.02.01.1.09.00 06 |                                                                       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                           | 50     | Unit    | 7,223,325     |
| 5.02.03            | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                        |                                                                                                         |                                                                                                                              |        |         |               |
| 5.02.03.1.01       | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                       |                                                                                                         | Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                              | 4      | Indeks  |               |
| 5.02.03.1.01.00 06 |                                                                       | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                                 | 1      | Laporan | 86,807,913    |
| 5.02.03.1.01.00 07 |                                                                       | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 3      | Laporan | 2,060,283,411 |
| 5.02.03.1.01.00 09 |                                                                       | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | 1      | Laporan | 43,736,442    |
| 5.02.03.1.01.00 10 |                                                                       | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1      | Dokumen | 21,868,221    |
| 5.02.03.1.01.00 11 |                                                                       | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 1      | Laporan | 420,000,000   |

**Gambar 1. 1 Rencana Kerja BPAD Tahun 2024**

*Sumber: Data BPAD, 2024*

Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun sejumlah strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset daerah. Berlandaskan data empiris, fokus utama ditujukan pada digitalisasi sistem informasi aset, yang bertujuan mempermudah pemantauan dan pelaporan. Selain itu, akan dilakukan evaluasi nilai aset untuk memastikan optimalisasi penggunaan dan meningkatkan potensi pendapatan daerah. Melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, rencana ini diharapkan dapat mendukung

pengembangan infrastruktur, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan aset daerah yang berdampak positif bagi masyarakat Jakarta.

Pemeliharaan peralatan dan mesin yang efektif merupakan komponen penting dalam pengelolaan barang milik daerah, khususnya di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. Inventarisasi barang daerah tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan, tetapi juga menjadi dasar untuk menentukan prioritas pemeliharaan dan perbaikan. Data menunjukkan bahwa banyak peralatan dan mesin mengalami penurunan fungsi akibat kurangnya pemeliharaan yang terjadwal dan sistematis. Strategi yang diusulkan akan mengoptimalkan proses inventarisasi melalui penerapan teknologi informasi terkini, memungkinkan pemantauan aset secara real-time. Langkah ini diharapkan dapat memperpanjang umur aset, meningkatkan efisiensi operasional, dan menekan biaya perawatan. Dengan strategi ini, Badan Pengelolaan Aset Daerah diharapkan dapat menjaga kualitas dan fungsi aset publik, memperlancar pelayanan, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah.

Menghadapi peningkatan kompleksitas dan volume aset, Provinsi DKI Jakarta membutuhkan strategi sistematis untuk memastikan peralatan dan mesin berada dalam kondisi optimal dan siap digunakan. Inventarisasi yang akurat menjadi landasan penting, karena informasi mengenai kondisi dan lokasi barang dapat meminimalkan kerugian dan memaksimalkan pemanfaatan aset. Rencana strategis tahun 2024 berfokus pada penguatan sistem inventarisasi terintegrasi dan pelaksanaan program pemeliharaan berkala, yang bertujuan memperpanjang usia peralatan dan mesin. Dengan langkah ini, diharapkan pengelolaan aset daerah bisa berjalan lebih efisien dan transparan, mendukung pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Adapun penelitian terdahulu terkait penatausahaan aset tetap diantaranya Karunia & Ibrahim, (2021) menerangkan bahwa dalam aspek pencatatan Di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, belum ada tim inventarisasi dan penanggung jawab ruang yang

dibentuk, kurangnya pekerja SDM, dan pencatatan masih dilakukan di Microsoft Excel. Selain itu, label registrasi sementara belum ditempelkan dikarenakan proses inventarisasi belum selesai, laporan hasil inventarisasi belum dibuat dalam hal pelaporan hasil pendataan BMN. Ramdany & Setiawati, (2021) menunjukkan hasil dimana ditemukan aset yang belum terdaftar dalam Daftar Barang di Ruangan (DBR) dan Daftar Barang di Luar Ruangan (DBL), masalah dengan pemutakhiran data aset, masalah dengan penyimpanan dokumen BMN, inventarisasi aset yang tidak ditemukan yang sedang berlangsung, dan masalah dengan sumber daya manusia. Berikutnya, Annisa et al., (2022) menunjukkan bahwa Kepala Biro Umum melalui Pengurus Barang Pengguna telah melakukan pendaftaran dan pencatatan aset tetap daerah menurut klasifikasi dan kodefikasi barang, melakukan inventarisasi aset tetap melalui tim inventarisasi sekali dalam lima tahun atau setiap tahun untuk aset tetap yang sedang dalam proses konstruksi, dan membuat laporan realisasi barang setiap semester dan tahunan yang dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Triandita et al., (2022) memperoleh hasil bahwa efektivitas inventarisasi aset Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung pada aspek tanggung jawab organisasi yang tidak efektif, pemahaman tentang manajemen inventarisasi yang tidak efektif, penggunaan tracking and control kegiatan inventarisasi yang tidak efektif, dan pengembangan rencana manajemen sistem informasi dan operasi yang tidak efektif secara fisik. Selanjutnya, Callysta & Pakereng, (2022) menunjukkan hasil yakni dengan menggunakan Unified Modelling Language (UML), seperti Use Case Diagram, Class Diagram, dan Activity Diagram, PT. Bangunindo Teknusa Jaya telah membuat sistem inventarisasi aset dengan menggunakan MarvelApp untuk desain sistemnya, yang membuat administrasi lebih mudah melakukan pendataan, melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian aset, dan memberikan manfaat, seperti data aset perusahaan menjadi lebih terstruktur dan mencegah kerusakan. Lebih lanjut, penelitian ini meneliti terkait penatausahaan aset tetap yang berfokus

pada inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa peralatan dan mesin di Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi Daerah Khusus Jakarta berdasarkan “PERGUB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.” Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), khususnya yang berupa peralatan dan mesin, merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Pengelolaan aset yang efektif dan efisien tidak hanya bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan tetapi juga untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah jelas dan akuntabel. Pada hal ini, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi Daerah Khusus Jakarta berperan strategis dalam memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki oleh pemerintah tercatat, terpelihara, dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan prinsip *good governance*. Namun dalam pelaksanaan inventarisasi aset tetap berupa peralatan dan mesin baru dilaksanakan pada bulan Mei 2024. Widiyati, (2024, 15 Mei) menjelaskan Secara resmi, tahapan pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), yang mencakup mesin dan peralatan, dibuka oleh Sekretaris Kota (Seko) Jakarta Selatan. Di Selasa, 14 Mei, label QR Code diserahkan secara simbolis kepada Pengurus Barang di Ruang Antasari Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan. Saat ini, Suku Badan Pengelolaan Aset (SBPAD) Kota Administrasi (Adm) Jakarta Selatan adalah kota administrasi pertama yang mengadakan roadshow untuk kegiatan inventarisasi BMD peralatan dan mesin. Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No. 47 Tahun 2021 menetapkan bahwa inventaris barang milik daerah harus dilakukan setiap lima tahun atau secara bertahap. Misalnya, inventaris BMD terakhir dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada tahun 2018. Dalam laporannya, Imelda Majid, Kepala SBPAD Kota Jakarta Selatan, menyatakan bahwa 185 Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah di Kota Jakarta Selatan memiliki 523.895 Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan total nilai kurang lebih 4,2 triliun rupiah. "Untuk diketahui bersama ini menjadi sasaran khusus rencana kerja

para kepala dengan beberapa indikator, mudah-mudahan target di Jakarta Selatan bisa tercapai," kata Imelda. Lebih lanjut, Ali Murthado sebagai Sekretaris Kota Jakarta Selatan memberikan label QR Code kepada Pengurus Barang dan menandai dimulainya proses inventaris barang milik daerah berupa peralatan dan mesin di wilayah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan.



**Gambar 1.2 Peresmian Tahapan Pelaksanaan Inventarisasi BMD**

*Sumber: Observasi & Dokumentasi Peneliti, 2024*



**Gambar 1.3 Kegiatan Sensus BMD Peralatan dan Mesin (KIB B) Pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan**

*Sumber: Observasi & Dokumentasi Peneliti, 2024*

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu adanya pendalaman terkait pentingnya pencatatan dan pelaporan BMD berbasis good governance mencakup aspek profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas.

Profesionalitas dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses inventarisasi dilakukan sesuai dengan standar yang tinggi dan diawasi oleh sumber daya manusia yang berpengalaman. Akuntabilitas menjadi kunci agar setiap aset dapat dipertanggungjawabkan dalam penggunaannya sehingga menghindari potensi kerugian negara. Transparansi dalam pencatatan dan pelaporan BMD memungkinkan masyarakat serta pihak-pihak terkait untuk mengetahui informasi mengenai pengelolaan aset pemerintah secara jelas dan terbuka. Sementara itu, efektivitas diperlukan agar aset dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Implementasi sistem inventarisasi yang baik di BPAD Jakarta tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan kontrol internal tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Melalui sistem inventarisasi berbasis *good governance*, diharapkan bahwa pengelolaan peralatan dan mesin milik daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan, mengurangi risiko kehilangan aset, serta memaksimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang penatausahaan aset daerah dengan judul **“Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Berupa Peralatan dan Mesin Berbasis *Good Governance* di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan dalam studi ini disusun berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dan menggambarkan secara singkat isu utama yang akan diteliti oleh mahasiswa. Fokus masalah disajikan untuk mengarahkan penelitian pada aspek yang paling relevan dan dapat disampaikan dalam bentuk kalimat tanya atau pernyataan umum. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana inventarisasi Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin berbasis *good governance* di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini erat kaitannya dengan rumusan permasalahan yang telah disusun. Secara umum, tujuan dari studi ini ialah untuk memperoleh pemahaman yang dapat diterapkan secara langsung atau untuk memberikan solusi konkrit terhadap permasalahan yang menjadi fokus studi. Adapun tujuan studi ini yakni untuk menganalisis inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa peralatan dan mesin berbasis *good governance* di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi positif yang diharapkan dapat diberikan baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan di dunia akademik maupun untuk penerapan praktis di lapangan. Hasil studi ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penatausahaan aset tetap dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset pemerintah.
- b. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan literatur mengenai penatausahaan aset tetap di sektor pemerintahan khususnya dalam hal pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah..
- c. Menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam melakukan kajian lebih lanjut terkait tata kelola aset daerah dan manajemen aset publik.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Lembaga  
Diharapkan bahwasanya hasil studi ini akan memberikan informasi yang konkret kepada lembaga terkait khususnya Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta dalam mengoptimalkan sistem

penatausahaan aset tetap. Hasil penelitian ini dapat membantu lembaga dalam memperbaiki mekanisme dan prosedur pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan aset tetap sehingga tercapai tata kelola aset yang lebih efisien, akuntabel, dan transparan. Dengan penerapan rekomendasi yang diberikan, diharapkan pengelolaan aset daerah akan berjalan lebih baik, mendukung efisiensi anggaran, serta mencegah potensi kebocoran aset.

b. Bagi Jurusan Administrasi Pembangunan Negara Dan Politeknik STIA LAN Jakarta

Hasil dari studi ini diharapkan dapat memperkaya referensi akademis dan bahan ajar bagi jurusan Administrasi Pembangunan Negara dan Politeknik STIA – LAN Jakarta. Temuan dan analisis dari penelitian ini dapat digunakan sebagai studi kasus atau materi pembelajaran terkait dengan tata kelola aset daerah, akuntabilitas publik, dan pengelolaan keuangan pemerintah. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan praktik di lapangan, serta menjadi inspirasi bagi mahasiswa dalam penelitian mereka di bidang administrasi publik dan manajemen aset.

c. Bagi Penelitian

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dan acuan untuk penelitian yang akan datang yang berfokus pada pengelolaan aset tetap di sektor pemerintahan, khususnya di daerah. Temuan studi ini dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk studi lebih lanjut tantangan dan peluang dalam penatausahaan aset tetap, serta memberikan gagasan baru bagi pengembangan teori manajemen aset di sektor publik. Dengan adanya rekomendasi praktis yang dihasilkan dari penelitian ini, peneliti lain dapat memperdalam analisisnya dengan melakukan studi komparatif atau penelitian lanjutan di

wilayah atau konteks yang berbeda.

Dengan demikian, diharapkan studi ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam mendukung pengelolaan aset yang lebih optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pemerintah dan masyarakat di Daerah Khusus Jakarta.



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**